

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abzed, A. bari. (2020). *Masalah Kewarganegaraan*. ind-hill- co.
- Amalia, N., & Jamaluddin. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (M. Faisal, Dr. S.Ag, SH (ed.)).
- Asikin, Z., & Amiruddin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Erwinsyahbana, T., & Syahbana, Tengku, Risky, F. (2022). *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Ramlan (ed.)).
- Fulthoni, Arianingtyas, R., Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2012). *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (M. Yamin (ed.)).
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2013). *civic education*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Handayani, R., Hutomo, S. C., Kartikasari, N. D., Sinaga, L. R. V., Suyati, Saragih, H. S., Wijayanti, I., T Aji, Y. G., Pujiani, Tasnim, Argaheni, N. B., Zulfatunnisa, N., & Humaira, W. (2022). *Dasar Kesehatan Reproduksi* (R. Watrianthos (ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Hutapea, purba. (2022). *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*.
- Isharyanto. (2015). *Hukum kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Lubis, Y. S., & Riza, F. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (F. Riza (ed.)). Umsu Press.
- Narsudin, U. (2022). *QnA Substansi Notaris dan PPAT Dalam Praktik*. Nas Media Pustaka.
- Pella, D. A. (2016). *Problem Implementasi Strategi*. Aida Infini Maksima.

- Sari, A. R. (2022). *Perkawinan Campuran*. Penerbit NEM.
- Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Sirin, K. (2018). *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Deepublish.
- Sudargo, G. (2012). *Hukum Perdata Internasional, jilid II bagian I* (7th ed.).
- Sugeng. (2021). *Memahami Hukum Perdata International Di Indonesia*. Prenada Media.
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Deepublish.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik*. Nusamedia.
- Tambunan, T. sony. (2019). *Glosarium istilah pemerintahan*. Prenada Media.
- Taufiqurokhman, Wekke, I. S., Andriansyah, & Saleh, A. M. (2021). *Pendidikan dalam Tinjauan Administrasi Publik: Teori & Praktik*. Samudra Biru.
- Usman, R. (2019). *No Title Hukum pencatatan sipil*. Sinar Grafika.
- Wardiono, K., Budiwati, S., Nuswardhani, & Rochman, S. (2018). *Hukum Perdata* (S. Rochman (ed.)).
- Yunianto, C. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Nusamedia.
- Zamroni, M. (2019). *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia.

JURNAL/ARTIKEL

- Amajihono, K. D. (2018). Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil. *Jurnal Education and Development*, 6(1), 141–153.
- Arliman S, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 294.

Bakarbessy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional. *Perspektif*, 17(1), 3.

Bidaya, Z., & Dewi, A. P. (2021). Tinjauan Status Kewarganegaraan Asing Akibat Perkawinan Campuran Menjadi Warga Negara Indonesia. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 54–61.

Cristianingsih, E. (2018). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2), 1–14.

Diah asari, N. P., Erviantono, T., & Winaya, I. K. (2020). Sistem Administrasi Perkawinan Beda Negara Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. *Citizen Charter*, 1(1), 16.

Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2).

Ginting, R., & Sudantra, I. K. (2012). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2(6), 1–5.

Hidayat, S. (2018). *Analisi Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut*. 5, 4.

Jogloabang. (2019). UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. In *UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* (p. 1).

Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, VII(13), 117–142.

Munawaroh, N. (2022). *Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan* (p. 1). 20 Mei 2022.

Nggilu, M. (2013). *STATUS WARGA NEGARA ASING YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI INDONESIA*. 1(3),

1–8.

- Pangaribuan, Renti, F., & Fitri, W. (2022). *Kajian Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antara Warga Indonesia dan Warga Belanda*. 6(1), 144–158.
- Rahman, A., Badi, A., & Asyiqien, M. Z. (2019). Implementasi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Kediri). *Legitima*, 1(2), 80–107.
- Sanjaya, Kusuma, I. (2022). *Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung* (pp. 1–9).
- Sinambela, S. (2021). *Perkawinan Semu Sebagai Upaya Untuk Memperoleh*. 3, 336–344
- Sarbini, A., Kusuma, A. R., & Djumlani, A. (2016). Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform*, 4(4), 251.
- Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 139–146.
- Sumiati, S. A., & Lestari, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Community Participation in Implementation Law Number 24 of 2013 About Population Administration. *Dimensi*, 9(1), 35–47.
- Susanti, D. O., & Shoimah, S. N. (2016). *Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara . 11(2), 172.*
- Sutejo, D., Kusmanto, H., Warjio, W., & Lubis, A. A. (2020). Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister*

Administrasi Publik, 2(2), 162–167.

Widanarti, H. (2018). Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan. *Diponegoro Private Law Review*, 2(563), 161–169.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang *Kewarganegaraan Republik Indonesia Undang-undang Administrasi di (Lembaran Negara di Tetapkan pada Tanggal 01 Agustus 2006)*

Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. (*Lembaran Negara Disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013*). Merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan.

INTERNET

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *All right reserved pusat penyuluhan dan bantuan hukum 2022*. Diakses pada tanggal 10 November 2022

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn. file:///C:/Users/User/Downloads/putusan_117_pdt.p_2019_pn_mdn_20221105061717.pdf. Diakses pada tanggal 8 November 2022

Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. *Citizenship result of mixed marriages* <https://media.neliti.com/media/publications/43265-ID-perkawinan-campuran-dan-akibat-hukumnya.pdf>. Diakses pada tanggal 10 November 2022